

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, ditemukan fakta dan Kesimpulan diantaranya:

1. Perlindungan Hukum Pegawai Negeri Sipil Yang Ditetapkan Sebagai Terpidana Tipikor Dalam Menjalankan Perintah Atasan sudah sesuai dengan putusan yang sudah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa hal yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan prosedur dan memberikan permasalahan dalam kasus tersebut yang menyebabkan ketidakseimbangan hak pegawai dan atasan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai tidak mempunyai kewenangan untuk menolak perintah atasan.
2. Perlindungan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sebagai terpidana tindak pidana korupsi (tipikor) dalam menjalankan perintah atasan perlu dipahami dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dalam konteks hubungan kerja maupun dalam konteks hukum pidana. Beberapa poin utama dalam kesimpulan ini yaitu pegawai negeri sipil memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh PNS atas perintah atasan, seharusnya pegawai memiliki hak untuk menolak perintah atasan apabila tidak sesuai dengan prosedur.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran yang mungkin dapat dilakukan oleh instansi untuk menanggulangi kendala dan permasalahan yang ada:

1. Pemberian perlindungan hukum yang jelas

Untuk memberikan kepastian hukum, perlu adanya regulasi yang lebih jelas mengenai perlindungan hukum bagi PNS yang melaksanakan perintah atasan dalam konteks tindak pidana korupsi. Hal ini untuk memastikan bahwa PNS yang terlibat dalam kasus tipikor tidak serta-merta menjadi korban dari atasan yang salah dalam memberikan perintah.

2. Pengawasan internal yang ketat

Perlu pengawasan yang lebih ketat dari instansi terkait untuk memastikan bahwa setiap perintah atasan yang diberikan kepada PNS tidak melanggar hukum, terutama dalam hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pengawasan internal dapat dilakukan dengan membentuk unit khusus yang menangani permasalahan tindak pidana korupsi dalam lingkungan pemerintahan

3. Pendidikan dan Pelatihan Etika dan Hukum

Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada PNS mengenai etika kerja, kewajiban hukum, serta akibat hukum dari tindak pidana

korupsi akan membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana. Ini juga akan memperkuat kapasitas PNS untuk memahami batasan-batasan hukum dan moral dalam menjalankan tugas.